MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Kelembagaan BPR dan BPRS

POJK | Nomor 7/2024 | Tahun 2024

Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 April 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur pendirian, kepemilikan, pengurus, jaringan kantor, merger, konsolidasi, dan penutupan sukarela BPR dan BPR Syariah.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan ini menjalankan amanat UU P2SK (UU 4/2023) untuk memperkuat kelembagaan BPR dan BPRS. Ia menggantikan POJK 62/POJK.03/2020 tentang BPR dan POJK 21/POJK.03/2019 tentang merger BPR/BPRS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: kelembagaan, perizinan, kepemilikan, kegiatan usaha, jaringan kantor, merger

Berlaku sejak 30 April 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Nama resmi berubah. Bank Perkreditan Rakyat kini Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kini Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Sumber: ojk.go.id

2 Badan hukum BPR/BPRS berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

Sumber: ojk.go.id

3 Jaringan kantor dibatasi dalam 1 provinsi yang sama dengan kantor pusat. Kantor lama di provinsi tetangga yang sudah ada boleh dipertahankan.

Sumber: ojk.go.id

4 Ada jenis kantor baru, Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus. Sentra Keuangan Khusus hanya melayani 1 kegiatan (dana atau kredit/pembiayaan) dan wajib izin OJK.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 BPR/BPRS milik pemegang saham pengendali yang sama dalam 1 pulau/kepulauan utama wajib bergabung, paling lama 2 tahun (3 tahun bila milik pemerintah daerah).

Sumber: ojk.go.id

6 BPR/BPRS boleh menawarkan saham lewat pasar modal bila, antara lain, modal inti minimal Rp80 miliar serta tata kelola, profil risiko, dan kesehatan minimal peringkat 2 dalam 2 periode terakhir.

Sumber: ojk.go.id

7 OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan atau menerima merger dan pengambilalihan. Lembaga keuangan mikro kini boleh ikut bergabung dengan BPR/BPRS.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memakai nama baru "Bank Perekonomian Rakyat" / "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dan mengajukan penetapan izin usaha dengan nama baru ke OJK.
- Membuka kantor hanya di dalam provinsi kantor pusat, dan meminta izin OJK untuk Sentra Keuangan Khusus.
- Bila satu grup punya beberapa BPR/BPRS sejenis di satu pulau, menyampaikan rencana tindak merger paling lama 4 bulan setelah POJK berlaku lalu menuntaskannya tepat waktu.
- Menyampaikan laporan secara daring sesuai mekanisme pelaporan baru.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Petakan apakah BPR masuk kewajiban konsolidasi grup dan pantau tenggat merger 2 atau 3 tahun.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Pastikan nama baru, anggaran dasar, dan permohonan penetapan izin usaha sudah beres di OJK.

Pemimpin Cabang

Rencana kantor baru harus di provinsi kantor pusat; Sentra Keuangan Khusus hanya untuk satu jenis layanan.

Legal

Siapkan dokumen merger, peleburan, atau pengambilalihan sesuai syarat baru, termasuk bila melibatkan LKM.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Konsolidasi

Penggabungan BPR/BPRS satu pemilik pengendali dalam satu pulau menjadi satu bank.

Sentra Keuangan Khusus

Kantor di bawah kantor pusat/cabang yang hanya menjalankan satu kegiatan, penghimpunan dana atau penyaluran dana.

PSP

Pemegang Saham Pengendali, pemilik yang mengendalikan BPR/BPRS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah BPR membuka cabang di provinsi lain?

JAWABAN

Pada dasarnya tidak; jaringan kantor dibatasi 1 provinsi kantor pusat. Kantor lama di provinsi tetangga yang sudah ada boleh dipertahankan.

TANYA 2

Berapa lama batas waktu konsolidasi BPR grup?

JAWABAN

Paling lama 2 tahun, atau 3 tahun bagi BPR/BPRS milik pemerintah daerah.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 April 2024; mencabut POJK 62/POJK.03/2020 dan POJK 21/POJK.03/2019. POJK 26/2022 tentang BPRS yang saat itu dinyatakan tetap berlaku kemudian dicabut POJK 25/2024 (menurut katalog).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Besaran modal disetor pendirian per zona dan nomor pasalnya belum dibaca langsung dari naskah 144 halaman.
- Rincian sanksi administratif bila nama baru belum dipakai belum dibaca langsung dari naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/FAQ POJK 7 Tahun 2024 Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.